

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2007, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Edi Setia dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Elwi Danil. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press : Surabaya.
- H.A.W. Widjaja. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Krisna Harahap. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT Grafitri.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Nuansa Aulia : Bandung.
- Marwan Efendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. CV. Mandar Maju: Bandung.

- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lamintang. PAF. 1997. *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lilik Muladi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia(Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, P.T Alumni, Bandung.
- , 2007. *Hukum Acara Pidana (Normatif, teorities, praktis dan masalahnya)*. Alumni : Bandung.
- Otje Salman & Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Putri Hukmawati. 2015. *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia Perspektif Ius Constitutum Ius Constituendum*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) : Jakarta.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia. 2010. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta.
- Saldi Isra & Edi O.S. Hiariej, 2009, *Prespektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, dalam Ziyayanto dan Ridwan Zachrie (Ed), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarto. 1999. *Hukum Pidana*,Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik
- Reda Manthovani. 2013. *Penyadapan Vs Privasi*. PT. BIP : Jakarta
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Binacipta.
- Soerjono Soekanto. 1978. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1983. *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- , Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soejono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi Berbasis Internet Protokol pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

**C. Website**

<http://jdih.kominfo.go.id>

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum/artikel.php>

